

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang direlevansikan dengan Teori Green Governance UNEP (*United Nations Environment Programme*), dapat disimpulkan bahwa penerapan Green Governance di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dari aspek komitmen terhadap keberlanjutan, dinas telah menunjukkan upaya nyata melalui kebijakan dan program yang mendorong pertanian ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta pendampingan kepada petani. Pada aspek integrasi pertimbangan lingkungan, pertimbangan lingkungan telah mulai diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pertanian, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana, pengawasan, dan pemerataan penerapan di lapangan. Partisipasi publik telah diwujudkan melalui Musrenbang, pertemuan kelompok tani, dan kegiatan penyuluhan, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan petani. Dari sisi akuntabilitas, mekanisme pelaporan, pengawasan, dan pemberian sanksi telah diterapkan sesuai aturan, namun transparansi informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar laporan dapat dipahami secara lebih luas. Sementara itu,

pada aspek keadilan dan kesetaraan, dinas telah berupaya mendistribusikan manfaat program secara merata dengan memperhatikan petani kecil dan wilayah terpencil, meskipun kendala geografis, keterbatasan anggaran, dan kapasitas masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, penerapan Green Governance di lokasi penelitian telah menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip UNEP, namun masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan Analisis Penerapan Green Governance Di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, antara lain:

a) Penguatan Komitmen Keberlanjutan

Dinas perlu memperjelas dan memperkuat kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dan dukungan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kondisi lokal Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b) Optimalisasi Integrasi Pertimbangan Lingkungan

Diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi dampak lingkungan dari setiap program pertanian, serta penguatan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Lingkungan Hidup, LSM, dan akademisi agar integrasi pertimbangan lingkungan dapat diterapkan secara konsisten.

c) Peningkatan Partisipasi Publik

Pemerintah daerah disarankan memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui forum dialog yang lebih rutin, penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, serta mekanisme umpan balik yang jelas agar aspirasi petani benar-benar terakomodasi dalam kebijakan.

d) Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

Dinas perlu menyajikan laporan kinerja dan keuangan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendorong pengawasan partisipatif agar akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dirasakan oleh publik.

e) Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan

Diperlukan pemutakhiran data kelompok tani secara berkala dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat bagi petani kecil, perempuan, dan wilayah terpencil, sehingga distribusi manfaat program pertanian dapat lebih adil dan merata.